



## PENATAAN TUKAD MATI

### Pro Normalisasi Minta Gubernur Legawa

**DUKUNGAN** agar proyek normalisasi dan penataan Tukad Mati di lingkungan Patasari, Kuta, dilanjutkan semakin gencar. Kalangan DPRD Badung meminta agar Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Bali kembali mengkaji larangan menyetop proyek senilai Rp 47 miliar itu. Pasalnya, proyek tersebut berdampak luas pada keamanan wilayah Seminyak, Legian, dan Kuta (Samigita) dari ancaman banjir.

Desakan agar Dishut Bali kembali mengizinkan proyek berlanjut disampaikan Komisi I DPRD Badung yang membidangi hukum dan perizinan. "Gubernur jangan *saklek* dengan aturan, karena harus ada hal-hal prinsip yang harus dipertimbangkan, terutama keselamatan masyarakat kecamatan Kuta dari ancaman banjir," ujar anggota DPRD Badung I Made Duama, kemarin (2/9).

Duama mencontohkan pembangunan jalan tol yang juga masuk zona perlindungan, namun karena masyarakat membutuhkan bisa dibangun. Pun dengan proyek normalisasi Tukad Mati, yang bisa menangkal banjir yang biasa menggenangi wilayah Samigita.

Duama pun meminta agar Pemprov Bali *legawa* menerima proyek tersebut demi kepentingan rakyat. Pemprov harus memikirkan kepentingan lebih besar, yakni rakyat banyak. Duama juga mempertanyakan alasan Dishut menghentikan proyek mendadak. Menurut Duama, jika tidak berizin mestinya dihentikan dari awal. Namun ketika proyek penanggulangan banjir sudah berjalan, menjadi kebutuhan orang banyak, maka Pemprov harus mengizinkan proyek berlanjut. "Gubernur harus *legawa* untuk kepentingan yang lebih besar," harap Sekretaris Komisi I DPRD Badung ini. (san/djo)

Edisi : Kamis, 3 September 2015

Hal : 24





# Ratusan Kamar Oficial Mubazir

## Panitia Siapkan 1.500 Kamar, Hanya 580 yang Dihuni

**SINGARAJA** - Ratusan kamar hotel yang diperuntukkan bagi oficial pendukung Porprov Bali XII mubazir. Pasalnya, kamar hotel yang telah disediakan panitia induk ternyata tak dihuni. PHRI terang-terangan menyayangkan kondisi itu di hadapan rapat evaluasi panitia Porprov yang berlangsung Rabu kemarin (2/9).

Disambangi usai rapat, Ketua PHRI Bidang Akomodasi Dewa Ketut Suardipa mengatakan, selama Porprov Bali, panitia telah menyiapkan 700-an kamar hotel dari total kamar di Buleleng yang mencapai 1.500 kamar. Mulai city hotel hingga resort. Kamar itu diperuntukkan bagi oficial pertandingan mulai juri, wasit, hingga para pengurus cabor.

Akan tetapi, pada kenyataannya, hanya 580 kamar yang terpakai. "Sisanya tidak ditempati sekitar 100 lebih," ujar Suardipa, kemarin. Pihaknya mengaku miris melihat kondisi itu.

Pasalnya, kamar sudah di booking, namun tanpa penghuni. "Kasih anggaran, tidak ada yang nginap," jelasnya. PHRI sendiri mengaku teliti dengan kondisi semacam itu. "Kalau kami pasti cek, berapa kosong dan berapa tidak," jelasnya.

Lanjut dia, jika memang kamar tidak ditempati, lebih baik langsung konfirmasi. "Bisa-di-cancel, *kan* kami bisa alihkan untuk tamu yang lain," jelasnya.

Meski mengaku anggaran bisa mubazir, pihaknya antusias dengan pergelaran ini. "Ini baik sekali, karena pas low season ada event begini," terangnya. Dia berharap tahun-tahun berikutnya kembali menjadwalkan event sejenis untuk meningkatkan hunian. (dra/han)

Edisi : Kamis, 3 September 2015

Hal : 28





# Realisasi PBB Jembrana Gagal Penuhi Target

## Perpanjang Waktu Pembayaran

NEGARA - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Jembrana dari pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2015 ini meleset. Pihak Dispenda Jembrana berdalih, hal ini terjadi lantaran wajib pajak tidak taat bayar pajak sebagai imbas dari wacana penghapusan PBB yang dihembuskan pejabat di pusat.

"Masyarakat masih bersikukuh menunggu pembebasan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dijanjikan pemerintah pusat. Akibatnya, wajib pajak enggan membayar pajak meski petugas sudah menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang kepada wajib pajak," kata Kepala Dinas Pendapatan Pemkab Jembrana, Dewa Gde Kusuma Putra yang dikonfirmasi Rabu (2/9).

Menurut Kusuma, sebetulnya petugas Dispenda Jembrana

sudah mengambil langkah aktif dengan melakukan jemput bola ke wajib pajak, namun kurang mendapat apresiasi. Katanya, wacana penghapusan PBB membuat warga ogah-ogahan. Sebagai dampaknya, lanjut dia, pendapatan Pemkab Jembrana dari sektor PBB pun menurun drastis. Hingga saat ini baru tertagih Rp 5,1 miliar atau 63,75 persen dari target tahun 2015 senilai Rp 8 miliar. Padahal, pada tahun 2014 lalu saja mencapai Rp 6,8 miliar.

Nah, guna memenuhi target yang sudah ditetapkan, Kusuma menjelaskan bahwa Pemkab Jembrana memperpanjang waktu pembayaran PBB. Bila tahun sebelumnya pembayaran PBB hanya dilakukan hingga tanggal 31 Agustus, tahun ini diperpanjang hingga 30 November 2015.

"Wajib pajak yang membayar pada rentang waktu ini tidak akan dikenakan denda. Tetapi pembayaran harus dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan

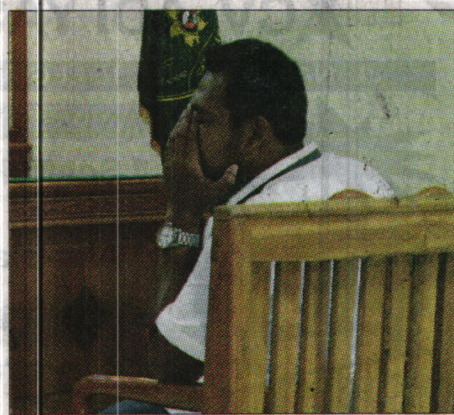
Pemkab Jembrana," kata Dewa Gde Kusuma Putra, kemarin.

Sedangkan bagi wajib pajak melakukan pembayaran setelah 30 November 2015, imbuhnya, maka akan dikenakan denda. Hal ini dilakukan untuk menggugah kembali kesadaran masyarakat membayar pajak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Di mana pikiran masyarakat belum terkontaminasi janji palsu yang diwacanakan pejabat pusat. (don/yor)

Edisi : Kamis, 3 September 2015

Hal : 29





KETUT ARI TEJA/RADAR BALI

**KETIBAN SIAL:** Gede Paramarta memberikan kesaksian untuk terdakwa Wayan Pageh dalam kasus korupsi pengadaan lahan BP3TKI di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

## Transaksi Korupsi di Teller BNI Renon

### Kasus BP3TKI Mark up Tanah

**DENPASAR** - Saksi kasus korupsi pengadaan lahan untuk kantor BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Nyoman Gede Paramarta mengakui melakukan transaksi korupsi di teller BNI Renon. Hal itu disampaikan saat dia bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala BP3TKI dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Wayan Pageh, di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (2/9). Saksi sendiri adalah salah satu terdakwa dalam kasus ini ■

► Baca *Transaksi...* Hal 31

## Sudah Rugi, malah Jadi Terdakwa

### ■ TRANSAKSI

*Sambungan dari hal 21*

"Pak Prio (Pejabat Pembuat Komitmen Prio Adi Santoso, terdakwa dalam berkas terpisah, Red) yang datang, bertanya ke saya terkait lahan saya ini. Saya pas bersih - bersih di tanah itu," ungkapnya.

Setelah dinyatakan akan dijual, sempat ada pertemuan dengan Prio. Selanjutnya, bertemu dengan beberapa orang di Warung Leko Renon. Ada Prio, namun posisi satu meja dengan Pageh dan Wahyu Matondang alias Dodik. Memang peran Wahyu Matondang sangat dominan, dari penjelasan Paramarta. Saat pertemuan ini, disampaikan bahwa tanahnya dia jual Rp 4,5 miliar. "Rp 4,5 miliar bersih, artinya pajak, semua biaya tidak saya yang menanggung. Saya minta bersih Rp 4,5 miliar," ungkapnya.

Saat itu Dodik dan Pageh menyanggapi, tetapi menyampaikan bahwa harga akan dinaikkan menjadi Rp 6,7 miliar. Paramarta mengaku sempat takut dan bingung, tetapi diyakinkan oleh Pageh bahwa dia nanti yang mengurus. "Kalau dananya masuk ke rekening saya (saksi) nanti serahkan kelebihanannya," ungkap saksi.

Benar saja, belum ada akta jual beli malah dananya sudah masuk Rp 6,7 miliar. Setelah dana masuk, dia diminta bertemu di Hotel Inna Bali Beach, Sanur. Saat itu bertemu dengan beberapa orang, dan Dodik meminta kepada terdakwa Prio dan tersangka Trusti untuk ikut ke BNI Renon. Kemudian Paramarta naik motor, ke BNI. "Setelah cair Rp 750 juta, saya langsung serahkan di teller BNI Renon uang itu ke Prio dan Trusty," ungkapnya.

Takhanya itu. Berikutnya kembali diminta dengan nilai yang sama Rp 750 juta. Kemudian diminta lagi

Rp 450 juta, jika dihitung total Rp 2,2 miliar hasil mengangkat harga sisa masih Rp 250 juta. Kemudian ternyata membayar pajak untuk jual beli adalah Rp 335 juta. "Saat itu saya kembali dihubungi oleh Prio, saya dibebankan pajak Rp 170 juta, sisanya diambilkan dari Rp 250 juta yang sisa di rekening saya. Saya keberatan, tapi lantaran saya takut bermasalah saya akhirnya mau ikut menanggung pajak. Padahal sebelumnya sudah jelas, bersih Rp 4,5 miliar," jelas pria yang selalu menutup mukanya ketika difoto itu. Sekarang, selain rugi karena uang penjualannya berkurang, Paramarta malah menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Yang menarik lagi, ternyata Prio yang akan memberikan dana ke Pageh malah memberikan lewat Paramarta. Tidak jelas tujuannya, namun Rp 115 juta diserahkan ke Paramarta. Kemudian Paramarta memasukkan uang itu ke rekeningnya. "Pak Pageh telepon beberapa harinya minta uang itu, saya tarik Rp 115 juta dan sisa Rp 85 juta. Namun, yang mengambil anak buahnya bernama Pak Made," jelasnya.

Atas kesaksian ini, Pageh berusaha mengelak. Dia mengatakan banyak tidak benar. Namun, dia bingung bahkan beberapa kali dibentak oleh hakim. Sampai akhirnya Pageh mengatakan bahwa kesepakatan mengangkat harga Rp 6,7 miliar terjadi di notaris Putu Candra, bukan di Leko. Penjelasan ini langsung disambut baik oleh hakim. "Bagus, ini kesaksian saudara. Bagus nanti akan bisa terbongkar lebih jauh, terdakwa saya minta yang jujur. Notaris kami akan kejar perannya, nanti dia dipanggil juga," ungkapnya. Atas pernyataan hakim ini, terdakwa Pageh sempat bengong juga. Selain Pageh, kemarin (2/9) juga digelar sidang eksepsi dengan terdakwa Prio Adi Santoso. (art/yes)

Edisi : Kamis, 3 September 2015

Hal : 21 dan 31





# Wow, Dana Paslon Hampir Rp 20 M!

**Su-Su Rp 19,5 Miliar, GiriAsa Rp 18,7 Miliar**

**MANGUPURA** - Persaingan antara pasangan calon (paslon) Made Suidiana - Nyoman Sutrisno (Su-Su) dengan Nyoman Giri Prasta - Ketut Suiasa (GiriAsa) semakin sengit. Tidak hanya ketat dalam menggalang massa, persaingan keduanya juga terjadi dalam hal penyediaan dana kampanye.

Namun, untuk dana kampanye, pasangan Su-Su tampaknya lebih unggul. Data yang didapat koran ini, pasangan Su-Su terlihat lebih "subur" dibandingkan GiriAsa. Jumlah dana kampanye paket Su-Su diplot sebesar Rp 19,5 miliar.

Sedangkan rivalnya paket GiriAsa sebesar Rp 18,7 miliar. Jika dibandingkan, paket Su-Su unggul Rp 800 juta, dibandingkan dana kampanye GiriAsa. Jumlah dana kampanye ini sudah diputuskan melalui surat keputusan (SK) KPUD Badung. "SK jumlah dana kampanye ini sudah kami keluarkan. Paket Suidiana Sutrisno dana kampanye Rp 19,5 miliar, GiriAsa Rp 18,7 miliar. Tapi, jumlah tersebut adalah jumlah maksimal. Tidak boleh lebih dari itu," tegas Ketua KPUD Badung, AA Gede Raka Nakula kepada koran ini kemarin (2/9).

Terkait jumlah dana kampanye kedua paslon bisa berbeda, Nakula menyebut jika jumlah dana kampanye tersebut berdasarkan kese-



pakatan tim pemenang kedua paslon. KPU sifatnya hanya memutuskan saja. "Pola kampanye yang digunakan keduanya sepertinya berbeda. Makanya jumlahnya tidak sama," imbuh Nakula.

Lebih jauh Nakula menjelaskan, dana kampanye tersebut diluar pembuatan alat peraga kampanye (APK) dan iklan, yang sudah ditanggung KPU. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kampanye terbuka dan pertemuan tertutup. "Dana kampanye itu untuk membeli snack, makanan, dan souvenir. Untuk snack, kami batasi satu orang Rp 35 ribu, sedangkan souvenir seperti topi atau kaus maksimal Rp 25 ribu," beber pria berkulit hitam manis itu.

Kalau hanya untuk membeli snack dan souvenir jumlahnya sampai miliaran? Dijelaskan Nakula, jumlah dana yang cukup besar karena digunakan selama masa kampanye

■ Paket Suidiana Sutrisno Rp 19,5 miliar

■ Paket GiriAsa Rp 18,7 miliar

■ Ketua KPUD Badung, AA Gede Raka Nakula menyatakan bahwa jumlah dana kampanye kedua paslon tersebut berdasarkan kesepakatan kedua tim pemenang. KPUD hanya memutuskan saja

■ Dana kampanye itu disebut-sebut untuk membeli snack, makanan, souvenir. Untuk snack, maksimal satu orang Rp 35 ribu, souvenir seperti topi atau kaus maksimal Rp 25 ribu

GRAFIS: DYAH FEDIAWATU/RADAR BALI

berlangsung. Dia mencontohkan, saat menggelar rapat terbuka umum atau kampanye terbuka dihadiri 200 ribu orang. Jumlah 200 ribu orang itu kemudian dikalikan Rp 35 ribu untuk snack dan souvenir.

Untuk sumber dana, Nakula menyebut boleh dari mana saja asal jelas. Misal dari perorangan dibatasi Rp 50 juta. Sementara dari kelompok berbadan hukum maksimal Rp 500 juta. Data identitas juga harus disampaikan dengan jelas. "Pelaporan kampanye sebanyak tiga tahap. Nanti akhir kampanye akan ada pemeriksaan dana kampanye," tukasnya.

Jumlah dana kampanye ini menunjukkan jika politik membutuhkan biaya yang mahal. Meski anggaran sosialisasi seperti pemasangan APK dan iklan sudah ditanggung uang negara melalui KPU, *toh* tetap saja dana yang diperlukan mencapai puluhan miliar. (san/pit)

Edisi : Kamis, 3 September 2015

Hal : 23